

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140/M-IND/PER/10/2009**

**TENTANG**

**PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN  
INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah sesuai Pasal 3 ayat (1) butir a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Papua Tahun 2010 – 2014;
- b. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Papua Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Papua yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Unggulan Provinsi Papua adalah :
  - a. Industri Pengolahan Kakao menjadi coklat bubuk, pasta, *liquor*, kue, industri makanan dari coklat dan kembang gula;
  - b. Industri Pengolahan Kopi menjadi kopi bubuk; dan
  - c. Industri Pengolahan Ubi Jalar/ Batatas menjadi tepung batatas, biskuit, mie instant dan makanan ringan (*snack food*).
3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

## Pasal 2

- (1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi;
  - b. Pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi Pelaku industri pengolahan kakao, kopi dan ubi jalar/batatas baik pengusaha maupun institusi lainnya;
  - c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
  - d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi guna mendorong partisipasi masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

## Pasal 3

- (1) Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Papua dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
- (3) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) agar dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Provinsi dalam kurun waktu 2010 – 2014.

## Pasal 4

Pemerintah Provinsi Papua membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI**

ttd

**FAHMI IDRIS**

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua;
4. Gubernur Provinsi Papua;
5. Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Papua.

## **PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI PAPUA**

### **I. PENDAHULUAN**

Provinsi Papua menentukan produk olahan kakao, kopi dan ubi jalar/batatas sebagai industri unggulannya didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah seperti sumbangan nilai produk-produk tersebut terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi dan potensi pengembangan 5 (lima) tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain.

Lingkup pengembangan industri unggulan Provinsi Papua terdiri atas 3 (tiga) industri unggulan, yaitu :

- a. Industri Pengolahan Kakao menjadi coklat bubuk, pasta, *liquor*, kue, industri makanan dari coklat dan kembang gula.
- b. Industri Pengolahan Kopi menjadi kopi bubuk.
- c. Industri Pengolahan Ubi Jalar/ Batatas menjadi tepung batatas, biskuit, mie instant dan makanan ringan (*snack food*).

Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut, telah disusun Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tahun 2010-2014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.

### **II. SASARAN PENGEMBANGAN**

#### **2.1. Industri Pengolahan Kakao**

Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)

- a. Bertumbuhnya industri pengolahan kakao,
- b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan industri lokal,
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025)

- a. Berkembangnya industri pengolahan kakao,
- b. Meningkatnya ekspor produk pengolahan kakao,
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.

## **2.2. Industri Pengolahan Kopi**

Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)

- a. Bertumbuhnya industri pengolahan kopi,
- b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan industri lokal,
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025)

- a. Berkembangnya industri pengolahan kopi,
- b. Meningkatnya ekspor produk pengolahan kopi,
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.

## **2.3. Industri Pengolahan Ubi Jalar/ Batatas**

Sasaran Jangka Menengah 2010-2014

- a. Bertumbuhnya industri pengolahan ubi jalar
- b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan industri lokal
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.

Sasaran Jangka Panjang 2015-2025

- a. Berkembangnya industri pengolahan ubi jalar
- b. Meningkatnya ekspor produk pengolahan ubi jalar
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.

# **III. STRATEGI PENGEMBANGAN**

## **3.1. Industri Pengolahan Kakao**

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan industri pengolahan kakao adalah meningkatkan nilai tambah dari industri pengolahan kakao, meningkatnya kapasitas SDM Aparatur/Tenaga penyuluh lapangan, mengembangkan industri

pendukung dan terkait, meningkatkan peranan lembaga litbang atau laboratorium uji mutu.

### **3.2. Industri Pengolahan Kopi**

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan industri pengolahan kopi adalah dengan meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan kopi, meningkatkan kualitas kopi dan meningkatkan peranan lembaga litbang serta perluasan pasar.

### **3.3. Industri Pengolahan Ubi Jalar/ Batatas**

Model pengembangan industri pengolahan ubi jalar secara terpadu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah industri pengolahan ubi jalar dalam rangka peningkatan gizi dan ketahanan pangan, secara terpadu dengan melibatkan seluruh *stakeholder* melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu :

- a. Peningkatan ubi jalar melalui langkah-langkah : penggunaan bibit unggul; mendorong petani menggunakan teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas lahan; mendorong untuk perluasan lahan; mendorong pemda untuk menetapkan harga patokan ubi kayu; dan meningkatkan produktifitas.
- b. Pengembangan industri pengolahan ubi jalar melalui langkah-langkah : mengembangkan *pilot project* industri hilir berbasis ubi jalar dengan produk biskuit sebanyak 3 (tiga) unit masing-masing di Kabupaten Keerom, Merauke, dan Jayawijaya; mengembangkan industri pengolahan mie instan 2 (dua) unit yakni di Kabupaten Keerom, dan Merauke; mengembangkan industri pengolahan tepung batatas untuk di-*supply* pada industri pengolahan biskuit dan mie instan selain digunakan oleh masyarakat dalam mengolah berbagai makanan ringan dari batatas; meningkatkan promosi bagi investor untuk membangun industri hilir pengolahan ubi jalar.



Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

- c. Rekayasa kelembagaan petani melalui langkah-langkah: pendampingan tenaga penyuluh; pembentukan kelompok tani batatas dan merumuskan organisasi kelompok tani; *pilot project* penggunaan bibit unggul dan teknologi inovasi baru.

## IV. RENCANA AKSI (2010-2014)

## 4.1. Industri Pengolahan Kakao

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penerapan SNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• BSN</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPMPPI</li> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM,</li> <li>• BPOM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASKINDO</li> <li>• MAI</li> </ul>						
2.	<i>Pilot project</i> industri pengolahan kakao termasuk									
	a. Penyusunan Strategi Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM;</li> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASKINDO</li> <li>• Industri Permesinan</li> <li>• Desainer Grafis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai kakao Jember</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul>					
	b. Bantuan Sarana Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> <li>• LIPI</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM;</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASKINDO</li> <li>• Industri Permesinan</li> <li>• Desainer Grafis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai Besar Kakao Jember</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul>					
3.	Meningkatkan jaringan									

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
	pemasaran									
	a. Penyusunan Strategi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depdag</li> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> <li>• Depperin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Disbun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASMINDO</li> <li>• MAI</li> <li>• Industri Pengolahan Kakao</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• BUMN</li> </ul>					
	b. Membangun kemitraan sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depdag</li> <li>• Depperin</li> </ul>	Dinas Perindagkop dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASMINDO</li> <li>• MAI</li> </ul>						
4.	Menyusun profil Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> <li>• Deptan</li> <li>• BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>• BKPM</li> </ul>							
5.	Pengembangan SDM									
	a. Pelatihan (TOT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASMINDO</li> <li>• MAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Lembaga diklat</li> <li>• Balai Besar Perkebunan</li> </ul>					
	b. Bantuan Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASMINDO</li> <li>• MAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Lembaga diklat</li> </ul>					

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
			Perkebunan dan Peternakan		• Balai Besar Perkebunan					
	c. Magang / study banding	• Depperin • Depdag • Deptan	• Dinas Perindagkop dan UKM • Dinas Perkebunan dan Peternakan	• ASMINDO • MAI	• Perguruan Tinggi • Lembaga diklat • Balai Besar Perkebunan					
6.	Penerapan / peninjauan pajak ekspor kakao	• Menko • Depkeu • Depdag	Kanwil Keuangan							
7.	<i>Pilot project</i> fermentasi di sentra produksi	• Depperin • Deptan	• Disperindagkop dan UKM • BAPPEDA • Badan Pertanahan • Biro Perlum	• ASKINDO • Industri Permesinan	Perguruan Tinggi					
8.	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan pendampingan	• Depperin • Kement Kop dan UMKM	• Dinas Perkebunan dan Peternakan • Disperindagkop dan UKM	• ASKINDO • MAI	Perguruan Tinggi					
9.	Pengaturan perdagangan	• Depperin • Depdag • Kement Kop dan UMKM	• Dinas Perindagkop dan UKM • Dinas	• ASKINDO • MAI	Perguruan Tinggi					

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
			Perkebunan dan Peternakan • DPRD • Biro Hukum							
10.	Peningkatan kualitas	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	• ASKINDO • MAI	Perguruan Tinggi					
11.	Peningkatan kemitraan	• Depperin • Deptan • Kement Kop dan UMKM	• Dinas Perindagkop dan UKM • Dinas Perkebunan dan Peternakan	Perusahaan Perkebunan	Perguruan Tinggi					
12.	Pengembangan promosi, pameran dan pemasaran	• Depdag, • Depperin • Deplu • Kement Kop dan UMKM • BKPM • Dephub	• Dinas Perindagkop dan UKM • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Perhubungan • Bappeda • Badan Promosi	• ASKINDO • MAI • Dekranasda	Perguruan Tinggi					
13.	Monitoring dan evaluasi		• Dinas Perindagkop dan UKM • Dinas Perkebunan dan							

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
			Peternakan							
14.	Peningkatan peran litbang dan akademisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• LIPI</li> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASKINDO</li> <li>• MAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AKPER</li> <li>• UNCEN</li> </ul>					
15.	Peningkatan fasilitas permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dep Koperasi dan UKM</li> <li>• Depkeu</li> <li>• Lembaga Perbankan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>• Lembaga keuangan</li> <li>• Perbankan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASKINDO</li> <li>• MAI</li> <li>• Lembaga keuangan non bank</li> </ul>	Perbankan					
16.	Peningkatan produktivitas tanaman kakao									
	a. Perbaikan budidaya dan perluasan areal	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan							
	b. Penanggulangan hama dan penyakit tanaman kakao	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan							
	c. Mekanisasi pertanian	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan							
	d. Monitoring dan evaluasi	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan							

## 4.2 Industri Pengolahan Kopi

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penerapan SNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• BSN</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPMPPI</li> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• BPOM</li> </ul>	AEKI						
2.	Mengembangkan <i>Pilot project</i> Industri pengolahan Kopi									
	a. Bantuan Sarana Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>							
	b. Pendampingan Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>							
3.	Meningkatkan Jaringan Pemasaran									
	a. Penyusunan Strategi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depdag</li> <li>• Depperin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan</li> </ul>							

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
			dan Peternakan							
	b. Membangun Kemitraan Usaha		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	Eksportir						
4.	Menyusun Profil Investasi	Depperin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>							
5.	Pengembangan SDM									
	a. Pelatihan (TOT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depperin</li> <li>Depdag</li> <li>Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perguruan Tinggi</li> <li>Lembaga diklat</li> <li>Balai Besar Perkebunan</li> </ul>					
	b. Bantuan Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depperin</li> <li>Depdag</li> <li>Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perguruan Tinggi</li> <li>Lembaga diklat</li> <li>Balai Besar Perkebunan</li> </ul>					



Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
6.	<i>Pilot project</i> Industri Pengolahan Kopi Skala Komersial di kelompok Tani									
	a. Pengadaan Sarana Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> <li>• Deptan</li> </ul>	Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov./Kab/Kota		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bina Marga</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul>					
	b. Implementasi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> <li>• Deptan</li> </ul>	Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov./Kab/Kota	Dunia usaha						
	c. Pengembangan Kelembagaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>		Asosiasi					
7.	Membangun Kelembagaan Kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>							
8.	Menyusun Perda Perdagangan Biji Kopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>• Biro Hukum</li> </ul>		DPRD					
9.	Peningkatan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perguruan</li> </ul>					

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
	SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> <li>• Deptan</li> </ul>	Perindagkop dan UKM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>		Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga diklat</li> <li>• Balai Besar Perkebunan</li> </ul>					
10.	Meningkatkan Sarana Dan Prasana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dephub</li> <li>• Dep. ESDM</li> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> <li>• Kement Kop dan UMKM</li> <li>• Kement PDT</li> <li>• Dep. PU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PU</li> <li>• Disperindag</li> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dis. Kimpraswil</li> <li>• Dinas Pertambangan</li> <li>• Dis. Perhub</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Telkom</li> <li>• PT Posindo</li> <li>• PT PLN</li> </ul>					
11.	Peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman kopi									
	a. Perbaiki budidaya dan perluasan areal	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan							
	b. Penanggulangan hama tanaman kopi	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan							
	c. Mekanisasi pertanian	Deptan	Dinas Perkebunan dan Peternakan							

## 4.3. Industri Pengolahan Ubi Jalar/ Batatas

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Promosi investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deptan</li> <li>• BKPM</li> <li>• Depperin</li> <li>• Depdag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindagkop dan UKM</li> <li>• Distan</li> <li>• BKPMD</li> </ul>							
2.	Pengembangan SDM a. Pelatihan TOT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deptan</li> <li>• Depperin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindagkop dan UKM</li> <li>• Distan</li> </ul>							
	b. Bantuan Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deptan</li> <li>• Depperin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindagkop dan UKM</li> <li>• Distan</li> </ul>							
3.	Kerjasama dengan lembaga penelitian untuk pengembangan industri pengolahan batatas	Depperin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindagkop dan UKM</li> <li>• Distan</li> </ul>							
4.	<i>Pilot project</i> industri tepung batatas, pengolahan biskuit dan mie instant 3 unit dan 15 unit skala UKM pengolahan <i>snack food</i>									
	a. Menyusun strategi pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deptan</li> <li>• Depperin</li> </ul>	Disperindagkop dan UKM							
	b. Bantuan sarana produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deptan</li> <li>• Depperin</li> </ul>	Disperindagkop dan UKM							
5.	Penyusunan profil investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deptan</li> <li>• Depperin</li> <li>• BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindagkop dan UKM</li> <li>• BKPMD</li> </ul>							

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
6.	Pendampingan tenaga penyuluh	Deptan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disperindagkop dan UKM</li> <li>Distan</li> </ul>							
7.	Menyusun konsep kelembagaan kelompok tani	Deptan	Distan							
8.	Distribusi produk dalam rangka ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat	Deptan	Distan							
9.	Koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan produktifitas ubi kayu mencapai 25 ton/ha	Deptan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindagkop dan UKM</li> <li>Distan</li> </ul>		Petani					
10.	Meningkatkan perluasan lahan ubi jalar	Deptan	Dinas Pertanian TP							
11.	Menggunakan bibit unggul hasil rekayasa genetika	Deptan	Dinas Pertanian TP							
12.	Membentuk kelompok tani	Deptan	Dinas Pertanian TP							
13.	Meningkatkan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depperin</li> <li>Deptan</li> </ul>	Dinas Pertanian TP	Industri pengolahan						
14.	Mendorong Pemda untuk perluasan lahan siap tanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depnakertrans</li> <li>Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian TP</li> <li>Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>Dishut</li> </ul>		Masyarakat adat					

Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
15.	Menyusun konsep pengembangan kawasan industri khusus ubi kayu jalar									
	a. Penyusunan detail kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depnakertrans</li> <li>• Deptan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Dishut</li> <li>• Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>• Distan TP</li> </ul>							
	b. Penyusunan dampak sosial ekonomi, lingkungan (AMDAL) terhadap pengembangan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemeneg LH</li> <li>• Depperin</li> </ul>	Bapedalda Kab							
	c. Penyusunan konsep perencanaan pembangunan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depperin</li> <li>• Dep nakertrans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindag</li> <li>• Bappeda</li> </ul>		Konsultan					